



LEMHANNAS RI

NEWSLETTER

TIADA KEBENARAN YANG MENDUA

EDISI XIV 20 SEPTEMBER 2010



"Minal Aidin
Wal Faidzin"
Selamat
Hari Raya!

DAFTAR ISI

1. Pembekalan Wapres kepada Para Peserta PPRA XLIV Lemhannas RI..... 1
2. Kebijakan Penanganan Imigran Gelap..... 2
3. Kunjungan Komisi I Parlemen Vietnam ke Lemhannas RI. 3
4. RDP Lemhannas RI dengan Komisi I DPR RI..... 4
5. Serah Terima Jabatan, Pelantikan, dan Pelepasan Pejabat Eselon III dan IV..... 5
6. Revitalisasi Industri Strategis Nasional..... 6
7. Penguatan Strategi Kebudayaan berbasis Nilai Kemajemukan..... 7
8. Pelaporan SSDN PPRA XLIV Lemhannas RI 2010..... 8
9. Peningkatan Peran Wirausaha Indonesia dalam Mengakselerasi Penurunan Angka Kemiskinan..... 9
10. Intellectual Exercise Dewan Pengarah Lemhannas RI... 10
11. Sosialisasi Sistem Komputer OS PPRA XLIV..... 10
12. Serah Terima Aset Tanah, Bangunan Sarana, dan Prasarana Kemhan RI kepada Lemhannas RI..... 11
13. Halal bi Halal di Lemhannas RI..... 11
14. Peringatan Nuzulul Qur'an dan Acara Buka Puasa Bersama di Lemhannas RI..... 12

PEMBEKALAN WAPRES KEPADA PARA PESERTA PPRA XLIV LEMHANNAS RI



Wakil Presiden Prof. DR. Boediono memberikan pembekalan kepada para peserta PPRA XLIV Lemhannas RI

Pada 19 Agustus 2010, menjelang berakhirnya pendidikan, 100 orang peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIV Lemhannas RI berkunjung ke Istana Wakil Presiden dalam rangka menerima pembekalan dari Wapres. Hadir pada acara tersebut, Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Muladi, S.H, Wakil Gubernur Marsdya TNI Dr. Rio Mendung Thalieb, M.Sc, PhD, Sekretaris Dewan Pengarah Mayjen TNI (Purn) Albert Inkiriwang, Sekretaris Utama, para Deputi, Tajar, Taji, Taprof, para Direktur, dan Kepala Biro Settama Lemhannas RI. Wakil Presiden Prof. Dr. Boediono, didampingi oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam)

Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres memberikan penjelasan mengenai faktor penentu kemenangan dalam peperangan didukung oleh dua kekuatan, yaitu *hardware* dan *software*. Amerika Serikat mampu memenangkan Perang Dunia II didukung oleh kekuatan ekonomi dan industri mesin perang yang disebut sebagai *hardware*. "Dalam peperangan lain, sebuah negara didukung oleh kekuatan *software* yaitu sistem sosial bangsa, seperti Vietnam," kata Boediono. Meski kalah dalam teknologi, Vietnam memiliki sistem sosial yang ulet mampu mengalahkan AS dalam Perang Vietnam.

Pada kesempatan tersebut wapres

berpesan agar *hardware* dan *software* tersebut harus diperhatikan dan selalu ditingkatkan, untuk memperkokoh ketahanan nasional. Menurut wapres seringkali ketahanan nasional suatu bangsa justru lebih banyak mendapat rongrongan dari dalam ketimbang ancaman dari luar. Suatu kebudayaan sangat mungkin runtuh akibat rongrongan dari dalam. Sejarah, telah mencatat beberapa peradaban yang telah mencapai puncaknya, kemudian runtuh akibat rongrongan dari dalam negeri sendiri, misalnya yang terjadi di Romawi atau Mesir. Kesemuanya runtuh, akibat proses penggerogotan dari dalam negeri sendiri.

KEBIJAKAN PENANGANAN IMIGRAN GELAP

Direktorat Pengkajian Bidang Hubungan Internasional menyelenggarakan *Roundtable Discussion* bertema “**Kebijakan Penanganan Imigran Gelap guna Menjaga Kewibawaan dan Tanggung Jawab Bangsa Indonesia di Tengah Tuntutan Hukum Internasional dalam Rangka Memperkokoh Stabilitas Nasional**” pada 12 Agustus 2010 di Ruang Rapat Nusantara I Gd. Trigatra Lemhannas RI.

Dalam *Black's Law Dictionary* dijelaskan bahwa imigrasi ilegal atau gelap adalah berpindahnya seseorang yang melewati batas wilayah suatu negara dimana perpindahan tersebut telah melanggar hukum keimigrasian dari negara tujuan. Data menunjukkan sekitar 192 juta orang tinggal di luar tanah kelahiran mereka, atau sebesar 3% dari seluruh populasi dunia dengan pertumbuhan 2,9%, ini artinya ada 1 orang imigran setiap 35 orang. Begitu pesatnya pertumbuhan tersebut, negara maju seperti Amerika Serikat dan negara berkembang termasuk Indonesia menghadapi masalah serius, sebabnya pendatang gelap masuk tidak semata-mata alasan ekonomi dan mencari penghidupan saja, namun ada kepentingan-kepentingan lain.

Ada beberapa trend global yang berpengaruh terhadap migrasi dan pengaturannya, yaitu trend demografi, kesenjangan ekonomi antara negara-negara berkembang dan negara maju, pembebasan perdagangan yang membutuhkan tenaga kerja imigran, jaringan komunikasi yang menghubungkan seluruh belahan dunia, serta migrasi transnasional. Tingginya permintaan tenaga kerja di negara maju dan ketersediaan tenaga kerja di negara yang ekonominya lemah telah menciptakan arus pekerja imigran global. Jaringan imigran yang terbentuk per wilayah telah menciptakan kekuatan besar dalam mempermudah pergerakan orang, mereka mempengaruhi keputusan politik dari negara tuan rumah untuk menyediakan bantuan ekonomi kepada



Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsdya TNI DR. Rio Mendung Thalieb membacakan *Keynote Speech* Gubernur pada RTD Internasional

negara asal mereka. Para imigran juga mempengaruhi ekonomi dan hubungan perdagangan antara negara tuan rumah dan negara asal mereka dan memerlukan proses integrasi yang lebih kreatif dan produktif. Dampak dari fenomena ini adalah penerimaan kewarganegaraan ganda, kepemilikan properti ganda, serta hak suara. Negara-negara sekarang menyadari bahwa keanggotaan tidak lagi berbasis wilayah. Sebuah bentuk baru dari hubungan orang dengan negara yang dengan cepat mengakar di dunia politik internasional, nampaknya akan mempengaruhi masa depan dari pergerakan umat manusia.

Indonesia sebenarnya menghadapi persoalan imigran gelap sejak lama, mereka datang ke Indonesia tidak bermaksud untuk menetap, tetapi hanya menjadikan Indonesia sebagai negara transit menuju negara lain (umumnya Australia). Alasan kuat masuk melalui Indonesia disebabkan posisi Indonesia sangat strategis dan berbatasan langsung dengan Australia. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para penyelundup (*smuggler*) untuk

mendapatkan keuntungan dari para imigran gelap tersebut, yaitu dengan cara membantu menyeberangkan dengan perahu ke Australia dari beberapa pantai di Indonesia.

Luasnya wilayah Indonesia dan terbatasnya kekuatan penjagaan baik di darat, laut, udara, serta lemahnya teknologi, menjadikan Indonesia rentan terhadap permasalahan ini. Kondisi ini apabila tidak segera mendapat perhatian, dapat dijadikan modus untuk masuk ke Indonesia secara ilegal untuk mengganggu keamanan, seperti terorisme ataupun penyelundupan narkoba. Diperlukan sistem yang komprehensif dan efektif dalam menanggulangi permasalahan imigran gelap yang melibatkan kerja-sama instansi terkait, di sisi lain Indonesia sedang fokus pada peningkatan kesejahteraan, penurunan kemiskinan, serta penciptaan lapangan kerja baru (*pro poor, pro job, pro growth*), oleh karena itu dibutuhkan strategi dan metodologi penanganan imigran gelap yang cerdas dan bijaksana dalam menjaga nama baik Indonesia dalam pergaulan internasional.

KUNJUNGAN KOMISI I PARLEMEN VIETNAM KE LEMHANNAS RI

Pada tanggal 20 Agustus 2010 Pukul 08.45 WIB, rombongan Komisi I Parlemen Vietnam melakukan kunjungan ke Lemhannas RI, dipimpin oleh H.E. Mr. Tran Dinh Nha, *Vice Chairman of the Committee of National Defence and Security of National Assembly of Vietnam*.

Ketua rombongan beserta tujuh orang anggota Parlemen Vietnam tiba di Lemhannas RI pukul 08.45 WIB. Acara diawali dengan melakukan *courtesy call* kepada Gubernur Lemhannas RI oleh Ketua Rombongan beserta beberapa orang perwakilan dari Parlemen Vietnam didampingi oleh Wakil Gubernur Marsdya TNI DR. Rio Mendung Thalieb, MarsdaTNI (Purn) Surya Dharma, S.IP., Karo Kerma Brigjen TNI Endang Hairudin ST, MM. dan Karo Humas Brigjen TNI Kusworo di ruang kerja Gubernur Lemhannas RI.

Kemudian acara dilanjutkan dengan diskusi di ruang rapat Gd. Astagatra Lt. III Barat pada pukul 09.00 WIB dengan pimpinan diskusi Marsda TNI (Purn) Surya Dharma, S.IP. beserta beberapa pejabat Lemhannas RI dan perwakilan peserta PPRA XLIV dan XLV masing-masing lima orang. Kegiatan diskusi sebelumnya diawali dengan pengenalan Lemhannas RI secara singkat melalui pemutaran *DVD Profile* Lemhannas RI.



Acara diskusi di ruang rapat Gd. Astagatra Lt. III Barat, Lemhannas RI



Suasana *courtesy call* rombongan anggota Parlemen Vietnam kepada Gubernur Lemhannas RI di ruang kerja Gubernur

Pada sesi diskusi dan tanya jawab, pihak tamu secara antusias memberikan banyak pertanyaan terkait dengan topik diskusi, yaitu: **pertama**, peran negara dan pemerintah terkait dengan pertahanan dan keamanan nasional; **kedua**, sistem/proses penyusunan undang-undang; **ketiga**, pengalaman dalam mendidik masyarakat mengenai pertahanan dan keamanan nasional.

Pimpinan rombongan Vietnam juga menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk belajar dari pengalaman Indonesia, dalam hal ini Lemhannas RI, terkait hubungan Lemhannas RI dengan Komisi I DPR RI, Kementerian Luar Negeri RI, TNI, Kepolisian RI dan lembaga-lembaga terkait/setara serta peran Lemhannas RI dalam perumusan Undang-Undang. Selain itu juga didiskusikan mengenai analisa kebijakan ekonomi yang terkait dengan pertahanan dan keamanan Indonesia serta komposisi dan kriteria penerimaan peserta pendidikan di Lemhannas RI.

Acara berakhir pada pukul 11.00 WIB, H.E. Tran Dinh Nha, beserta rombongan melakukan foto bersama dengan beberapa pejabat Lemhannas RI di depan Gd. Astagatra Lemhannas RI.

RAPAT DENGAR PENDAPAT LEMHANNAS RI DENGAN KOMISI I DPR-RI

Sesuai dengan Surat Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor: AG/6308/DPR RI/VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010, tentang undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) tanggal 2 September 2010 dengan mitra kerja Komisi I DPR RI, untuk membahas RKA-KL Lemhannas RI tahun anggaran 2011 yang berorientasi kepada pelaksanaan tugas dan fungsi Lemhannas RI sesuai peraturan presiden Nomor 67 Tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Lemhannas RI.

Acara dibuka oleh pimpinan Sidang yaitu Ketua Komisi I DPR RI, Drs. H. Mahfudz Siddiq, M.Si. pada pukul 13.00. di ruang Rapat Komisi I DPR RI. Pada acara rapat dengar pendapat tersebut Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Muladi, S.H., didampingi oleh Wakil Gubernur Marsdya TNI DR. Rio Mendung Thalieb, Sekretaris Dewan Pengarah Mayjen TNI (Purn) Albert Inkiriwang, Sekretaris Utama DR. Ardi Partadinata, Para Deputi dan beberapa pejabat lainnya memberikan penjelasan tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL) Lemhannas RI tahun anggaran 2011 di hadapan Komisi I DPR RI pada 2 September 2010 di DPR RI. Acara dilanjutkan



Drs. H. Mahfudz Siddiq, M.Si. memimpin sidang Komisi I di ruang rapat Komisi I DPR RI

dengan diskusi dan tanya jawab dan RDP diakhiri oleh pimpinan sidang pada pukul 16.00 WIB.



Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi S.H. didampingi oleh Wakil Gubernur dan Sekretaris Utama Lemhannas RI saat memberikan penjelasan RKA-KL Lemhannas RI T.A. 2011

SERAH TERIMA JABATAN, PELANTIKAN, DAN PELEPASAN PEJABAT ESELON III DAN IV

Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H. memimpin kegiatan Serah Terima Jabatan, Pelantikan, serta Pelepasan Pejabat Eselon III dan IV pada 3 September 2010, di ruang Nusantara, Gd. Trigatra Lemhannas RI. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur melantik dan mengambil sumpah pejabat yang bersangkutan. Kegiatan ini adalah bagian dari pembinaan personel yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja lembaga agar terjadi perubahan yang mengarah kepada pembaharuan sejalan dengan tuntutan perkembangan lingkungan.

Dalam konteks pembinaan personel, pergeseran dan alih jabatan memberi pelajaran penting, yaitu pembelajaran yang memungkinkan para pejabat yang bersangkutan mendapat pengalaman penugasan beragam dan berjenjang yang sangat diperlukan untuk menyukseskan pelaksanaan tugas pokok secara optimal.

Pejabat yang melaksanakan sertijab



Pengucapan sumpah kepada para pejabat yang dilantik pada acara serah terima jabatan di Ruang Nusantara, Gd. Trigatra Lemhannas RI

atas nama Kolonel Kes. Dra. Nilawati, M.M. dan empat pejabat yang lain. Pejabat yang dilantik atas nama Megawarni Simamora, S.E., M.M. dan

lima pejabat yang lain, serta pejabat yang dilepas memasuki masa purna bhakti yaitu Kolonel Kes. Drg. Zulkifli Nasution, Kolonel CKM (K) Dr. Zawiah Ramlie, S.KM., M.H., Kolonel CZI Soeharnanto HS, S.IP., Kolonel Caj. M. Sochib, Kolonel Adm. Bambang Sidik, S.H., Kolonel CPM Maman Taryana, S.H., Letkol Laut (S/W) Sri Suyati Indrasih, B.A.

“Saya yakin, saudara-saudara mampu melaksanakan tugas sesuai jabatan masing-masing, serta mampu melanjutkan dan meningkatkan kemajuan yang telah diraih pejabat sebelumnya, berikutnya kepada saudara-saudara yang telah menyelesaikan masa dinas aktifnya di Lemhannas RI agar tetap berpegang prinsip bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara tidak pernah berakhir, maka dimanapun saudara mengabdikan akan senantiasa berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” kata Gubernur mengakhiri pidatonya.



Para pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan

REVITALISASI INDUSTRI STRATEGIS NASIONAL

Pada tanggal 26 Agustus 2010 di Ruang rapat Gd. Astagatra Lt. III Barat, Lemhannas RI dilaksanakan rapat *Roundtable Discussion* (RTD) dengan tema “**Revitalisasi Industri Strategis Nasional untuk Meningkatkan Kemampuan Pelaksanaan Tugas Bidang Pertahanan dan Keamanan dalam Rangka Ketahanan Nasional**” yang dihadiri oleh Gubernur Lemhannas RI, Menteri Pertahanan RI, perwakilan dari Menteri Keuangan, perwakilan dari Ketua Komisi I DPR RI, perwakilan dari Kapolri, perwakilan dari Panglima TNI, Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia, dan lain-lain.

Industri strategis nasional bidang pertahanan dan keamanan merupakan suatu industri yang sangat penting demi kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di negara maju, industri strategis pertahanan dan keamanan bukan hanya sebagai sekedar pemenuhan alutsista kebutuhan militernya tetapi telah menjadi lokomotif perekonomian nasionalnya. Kondisi demikian dapat terwujud karena adanya dukungan keputusan politik, sumber pendanaan, kemampuan SDM, dan kualitas produksi yang handal.

Indonesia saat ini telah memiliki industri strategis bidang pertahanan



Suasana RTD yang diselenggarakan oleh Ditjian Hankam Deputy Pengkajian Lemhannas RI



Prof. DR. Muladi, S.H. membacakan Keynote Speech saat membuka RTD Hankam

dan keamanan antara lain PT. PAL, PT. PINDAD, PT. Dirgantara Indonesia (DI), PT. Dahana, dan lain-lain. Kondisi industri strategis nasional untuk meningkatkan kemampuan pelaksanaan tugas bidang pertahanan dan keamanan negara diakui belum memadai. Kondisi tersebut diakibatkan oleh berbagai permasalahan sangat kompleks yang dihadapi pengelola, antara lain: **pertama**, perlu adanya dukungan keputusan politik negara yang konsisten untuk meningkatkan industri strategis nasional; **kedua**, belum terealisasinya komitmen *end user* (TNI dan Polri) untuk menggunakan produk industri strategis yang diwujudkan dalam suatu perjanjian/ *Memorandum of Understanding* (MoU) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang; **ketiga**, belum intensifnya pelibatan perbankan nasional untuk mendukung pendanaan melalui *long-term loan scheme*.

Peningkatan kualitas industri strategis merupakan investasi tidak hanya untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, tetapi juga mengamankan seluruh sumber daya alam yang sangat bermanfaat demi meningkatkan kesejahteraan rakyat, di samping dalam rangka keikutsertaan menciptakan perdamaian dunia. Untuk itu, diperlukan komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri strategis, bukan hanya pada tataran kebijakan saja, tetapi

harus diimplementasikan oleh kementerian atau instansi yang terkait.

Meningkatkan kemampuan dan kapasitas industri strategis nasional bidang pertahanan dan keamanan diharapkan akan mewujudkan: **pertama**, kemandirian dan kedaulatan sistem persenjataan nasional; **kedua**, pengurangan ketergantungan serta kesulitan pembiayaan pengadaan alutsista dari negara lain; **ketiga**, sumber daya manusia yang unggul, kapasitas serta kapabilitas kreasi; **keempat**, daya industri pertahanan yang maju dan



Laporan Direktur Pengkajian Bidang Hankam kepada Gubernur Lemhannas sebelum RTD dibuka secara Resmi.

bersaing secara global.

Mengingat bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas industri strategis nasional bidang pertahanan dan keamanan merupakan suatu tuntutan di era globalisasi ini, maka dalam *keynote speech*-nya, Gubernur Lemhanas RI, menyatakan bahwa diperlukan komitmen yang tinggi dari para *stakeholder* baik dari kalangan eksekutif, legislatif, TNI/Polri, pengelola maupun pihak perbankan nasional, bukan hanya dalam pemenuhan alutsista untuk meningkatkan kemampuan pelaksanaan tugas bidang pertahanan dan keamanan negara saja, tetapi juga diharapkan menjadi lokomotif pertumbuhan perekonomian nasional.

PENGUATAN STRATEGI KEBUDAYAAN BERBASIS NILAI KEMAJEMUKAN

Direktorat Pengkajian Bidang Sosial Budaya mengadakan *Roundtable Discussion* (RTD) pada 2 September 2010 di Ruang rapat Nusantara I, Gd. Trigatra. RTD tersebut bertema “*Penguatan Strategi Kebudayaan yang Berbasiskan Nilai-Nilai Kemajemukan untuk Memperkokoh Rasa Persatuan dan Kesatuan dalam Rangka Pembangunan Nasional*” dan mengundang Jero Wacik, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur memberikan sambutan terkait pandangannya tentang strategi kebudayaan. Strategi kebudayaan dibutuhkan dalam menghadapi nilai negatif budaya global yang masuk ke Indonesia, hal ini diperlukan agar masyarakat memiliki ketahanan mental dalam menghadapi permasalahan hidup di masa kini dan mendatang serta mampu meningkatkan rasa percaya diri, kebanggaan dan kecintaannya pada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, diperlukan analisis situasi yang mencakup, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Perlu juga dilakukan analisis terhadap



Roundtable Discussion Bidang Sosial Budaya yang diselenggarakan di Ruang Rapat Nusantara I, Gd. Trigatra, Lemhannas RI

perkembangan, kecenderungan dan isu-isu strategis berkaitan dengan penguatan strategi kebudayaan yang berbasiskan nilai-nilai kemajemukan. Beberapa isu strategis yang perlu dicermati antara lain isu globalisasi, multi budaya (*multicultural*), pembiayaan (*budgetting*), desentralisasi (*decentralization*), dan peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pembenahan sistem manajerial lembaga-lembaga yang mengelola kekayaan budaya sehingga memenuhi kaidah tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Diperlukan beberapa indikator terukur dalam penguatan strategi kebudayaan berbasis nilai kemajemukan, yaitu:

Pertama, kebudayaan tumbuh atas dasar nilai-nilai luhur Pancasila;

Kedua, menurunnya ketegangan

dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat;

Ketiga, semakin kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa;

Keempat, semakin berkembangnya penerapan nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya nasional yang terwujud dalam setiap aspek kebijakan pembangunan, dan;

Kelima, meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya lokal (kearifan lokal).

Gubernur menyampaikan bahwa dalam penguatan strategi kebudayaan berbasiskan nilai-nilai kemajemukan perlu mempertimbangkan pengembangan modal sosial yang mendorong terciptanya ruang yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan.



Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik hadir sebagai undangan khusus pada RTD Bidang Sosial Budaya

PELAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI (SSDN) PPRA XLIV DAN XLV LEMHANNAS RI 2010



Gubernur, Wakil Gubernur, dan narasumber mendengarkan paparan dari Tim rombongan SSDN XLV tujuan Provinsi Kep. Riau



Paparan dari Tim Rombongan SSDN PPRA XLIV tujuan Provinsi Kalimantan Timur



Suasana paparan dari Tim SSDN PPRA XLIV tujuan Provinsi Papua

Pada tanggal 7 dan 8 September 2010 pukul 08.00 WIB di Gd. Panca Gatra Lt. III Barat Lemhannas RI diselenggarakan acara pelaporan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) PPRA XLIV Lemhannas RI Tahun 2010.

Dalam laporan yang disampaikan oleh Deputi Pendidikan Lemhannas RI, dilaporkan bahwa pelaksanaan SSDN PPRA XLIV berlangsung dari tanggal 23-27 Agustus 2010 keempat wilayah provinsi yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan pada tanggal 15-16 September 2010 dilaksanakan pelaporan SSDN PPRA XLV Lemhannas RI di Gd. Trigatra Lt. III Barat. SSDN PPRA XLV telah dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus-3 September 2010 dengan tujuan Nangroe Aceh Darussalam, Kepulauan Riau, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara.

Pelaporan SSDN PPRA XLIV dan XLV dihadiri oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Muladi S.H., Wakil Gubernur

Lemhannas RI, Marsdya TNI DR. Rio Mendung Thalieb, dan Sekretaris Utama Lemhannas RI, DR. Ardi Partadinata serta para Pejabat lainnya. SSDN PPRA XLIV dan XLV yang telah dilakukan ke masing-masing wilayah provinsi tersebut diatas dimaksudkan untuk memberikan pengalaman kepada peserta PPRA XLIV dan XLV dalam memperoleh dan mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan pembangunan nasional di wilayah tersebut dalam aspek kesejahteraan dan keamanan menyangkut delapan aspek/gatra meliputi Geografi, Demografi, Sumber Kekayaan Alam, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan sekaligus melakukan penilaian terhadap kondisi ketahanan nasional di masing-masing wilayah yang dikaitkan dengan tema pendidikan dan seminar PPRA XLIV tentang "IPTEK dalam Rangka Ketahanan Nasional", sedangkan untuk SSDN XLV dikaitkan dengan tema pendidikan dan

seminar PPRA XLIV tentang "Kualitas SDM dalam rangka pembangunan Nasional"

Selain itu, masing-masing rombongan SSDN PPRA XLIV meninjau secara langsung ke wilayah perbatasan dengan negara sahabat dan mendapat banyak masukan dari birokrasi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan masyarakat yang berada di daerah perbatasan, untuk kemudian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan pengelolaan daerah perbatasan selanjutnya.

Perolehan informasi, fakta dan data di masing-masing wilayah provinsi tersebut, setelah melalui analisis, diharapkan dapat ditujukan atau digunakan sebagai bahan masukan dari Lemhannas kepada masing-masing wilayah bagi peningkatan pelaksanaan pembangunan di wilayah masing-masing atau pembangunan nasional secara menyeluruh.



Suasana paparan dari Tim SSDN PPRA XLV tujuan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam



Suasana paparan dari Tim SSDN PPRA XLV tujuan Provinsi Maluku Utara



Penyerahan cinderamata dari Tim Rombongan SSDN PPRA XLIV tujuan Provinsi NTT kepada Gubernur Lemhannas RI

PENINGKATAN PERAN WIRAUSAHA INDONESIA DALAM MENGAKSELERASI PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN

Pada tanggal 3 September 2010 pukul 08.30 di Ruang rapat Nusantara I, Gd. Trigatra, Lemhannas RI diadakan acara *Roundtable Discussion* (RTD) tentang Peningkatan Peran Wirausaha Indonesia guna Mengakselerasi Penurunan Angka Kemiskinan dalam Rangka Memperkokoh Stabilitas Nasional. RTD tersebut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan fungsi serta peran Lemhannas RI di bidang pengkajian untuk mengkaji permasalahan yang mungkin timbul, baik permasalahan yang bersifat nasional dan regional maupun permasalahan bersifat internasional yang diperlukan oleh Presiden RI guna dijadikan masukan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional.

Kemajuan atau kemunduran ekonomi suatu bangsa sangat ditentukan oleh keberadaan dan peranan dari kelompok wirausahawan. Keberhasilan dalam meningkatkan pertumbuhan dan pemberdayaan kewirausahaan tidak lepas dari peran serta swadaya masyarakat, peran serta masyarakat menjadi kunci penting dalam membangun kewirausahaan yang berdaya saing.

Berdasarkan data BPS Maret 2010, garis kemiskinan penduduk Indonesia mencapai angka 211.726 per kapita per bulan. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa angka kemiskinan penduduk Indonesia masih tinggi dan perlu upaya khusus untuk mengentaskannya. Untuk itu, pemerintah melakukan beberapa kegiatan, yang salah satunya adalah mendorong perkembangan perekonomian nasional melalui pertumbuhan wirausaha yang dapat



Menteri Koperasi dan UKM, Syarifuddin Hasan menjawab pertanyaan dari salah satu peserta Roundtable Discussion

menjadi andalan dalam upaya meningkatkan perekonomian nasional maupun mengakselerasi penurunan angka kemiskinan, karena perekonomian nasional tidak akan berkembang tanpa dukungan dari peningkatan perekonomian rakyat.

Salah satu cara yang ditempuh untuk memberdayakan masyarakat adalah melalui peningkatan peran wirausaha. Melalui peran tersebut, potensi sumber daya alam maupun buatan dan kemampuan daerah terpetakan, serta dapat dikembangkan guna mengakselerasi menurunnya angka kemiskinan, serta memperkokoh stabilitas nasional.

Tiga klaster yang dicanangkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan adalah: **Klaster I**, Program keluarga harapan (PKH) sebagai pengganti BLT, juga Jamkesmas dan bea siswa untuk anak-anak dari keluarga miskin; **Klaster II**, Pemberdayaan masyarakat yang mencakup program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri; **Klaster III**, Pemberdayaan untuk usaha mikro dan kecil dengan kredit usaha rakyat (KUR) sebagai program unggulan.

Dunia saat ini tengah berada dalam era globalisasi, era yang membawa setiap negara di dalamnya masuk ke dalam persaingan ketat dan intensif. Untuk itu, Gubernur Lemhannas RI dalam *keynote speech*-nya menyampaikan bahwa setiap negara, termasuk Indonesia dituntut untuk membangun daya saing yang kuat agar tetap bertahan. Pemerintah diharapkan mampu mendorong, memfasilitasi, mengarahkan/ mendidik, menyerap dan menjalankan semangat kewirausahaan (*reinventing government*) dalam penyelenggaraan pemerintahannya.



Suasana Roundtable Discussion di Ruang Rapat Nusantara I, Gd. Trigatra, Lemhannas RI

INTELLECTUAL EXERCISE DEWAN PENGARAH LEMHANNAS RI

Pada tanggal 16 September 2010 di ruang rapat Gd. Asta Gatra Lt. III Barat Lemhannas RI diadakan acara *Intellectual Exercise* yang dipimpin oleh Prof. DR. Malik Fadjar dan dihadiri antara lain oleh Prof. Dorodjatun Kuntjoro Djakti, Sekretaris Dewan Pengarah, para Deputi, Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji dan Tenaga Profesional Lemhannas RI.

Yang menjadi pemapar pada acara tersebut adalah Mayjen TNI Amir Hamka Manan yang mengangkat topik "**Paradigma Baru Politik Indonesia Menghadapi Konflik Horizontal Dalam Negeri**" dan DR. C.A. Aryanti PS, S. PD, MH, dengan topik "**Permasalahan dan Solusi Ranah Informasi Menghadapi Konflik Horizontal Dalam Negeri**". Pada acara tersebut, Gubernur Lemhannas RI selaku Koordinator Dewan Pengarah, berhalangan hadir karena pada saat yang sama sedang memimpin pelaporan hasil pelaksanaan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) PPRA XLV.



Mayjen TNI Amir Hamka Manan memaparkan makalah dalam *Intellectual Exercise* Dewan Pengarah Lemhannas RI

SOSIALISASI SISTEM KOMPUTER OLAH SISMENNAS PPRA XLIV

Olah Sismennas (OS) merupakan salah satu kegiatan utama pendidikan yang dilaksanakan oleh Lemhannas RI dan tertuang dalam Kurikulum Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) serta ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Lemhannas. Olah Sismennas menjadi salah satu metoda pengajaran yang bersifat mutlak,

oleh sebab itu wajib dan harus diikuti oleh seluruh peserta PPRA. Pada dasarnya kegiatan Olah Sismennas bertujuan melatih peserta agar mampu bekerjasama dalam hubungan kelompok/ *team* secara terpadu dalam rangka pengambilan keputusan dan perumusan kebijaksanaan yang bersifat strategis serta berskala nasional, sekaligus melatih para peserta agar mampu mengimplementasikan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dalam proses pembangunan nasional dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi, lingkup nasional, regional maupun internasional.

Untuk pertama kalinya Olah Sismennas menggunakan sistem komputerisasi berbasis ICT yang menerapkan aplikasi *e-learning* dan *e-mail*, ini adalah merupakan kerjasama Deputi Pendidikan

dan Biro Telematika. Untuk mendukung kegiatan Olah Sismennas PPRA XLIV tahun ini, dibutuhkan tenaga pendukung baik untuk operator maupun teknisi yang menguasai dalam penggunaan sistem komputerisasi tersebut guna menjamin terselenggaranya Olah Sismennas berjalan baik dan lancar.

Oleh karena itu, untuk menjamin kelancaran, dilaksanakan Sosialisasi Sistem Komputer Olah Sismennas PPRA XLIV pada tanggal 2 September 2010 di ruang Rapat Gd. Astagatra Lt. III Barat yang dibuka oleh Dir. Prog. Dik, Brigjen TNI Paryaman Manurung. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan teknis dari tim Biro Telematika yang membangun sistem Olah Sismennas tersebut dan sekaligus dilakukan pelatihan penggunaannya yang bertempat di Laboratorium Biro Telematika, Gd. Astagatra Lt. VI.



Suasana Sosialisasi Sistem Komputer Olah Sismennas PPRA XLIV di Ruang rapat Gd. Astagatra Lt. III Barat Lemhannas RI

SERAH TERIMA ASET TANAH, BANGUNAN SARANA, DAN PRASARANA KEMHAN RI KEPADA LEMHANNAS RI

Kementerian Pertahanan RI menyerahkan aset tanah, bangunan, sarana, dan prasarana yang sebelumnya masih atas nama Kementerian Pertahanan (Kemhan) kepada Lemhannas RI pada 10 Agustus 2010. Sebagai perwakilan dari Lemhannas RI adalah Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsdya TNI DR. Rio Mendung Thalieb, dan dari Kemhan RI adalah Sekretaris Jenderal Kemhan, Marsekal Madya TNI Eris Heryanto.

Lemhannas RI didirikan tahun 1965 oleh Presiden RI pertama, Ir. Soekarno, dengan nama Lembaga Pertahanan Nasional yang berada langsung di bawah Presiden RI. Selanjutnya atas dasar Keppres No. 60 Tahun 1983 berubah nama menjadi Lembaga Ketahanan Nasional yang berada di bawah Panglima ABRI. Kemudian berdasarkan Keppres No. 4 tahun 1994 berubah menjadi langsung di bawah Menteri Pertahanan dan Keamanan.

Akhirnya berdasarkan Keppres No. 42 dan 43 tahun 2001 Lembaga Ketahanan Nasional RI berubah kedudukan dan struktur organisasi menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), dan bertanggung jawab kepada presiden. Sejak tahun 2001 tersebutlah penggunaan aset tanah, bangunan, sarana, dan prasarana Kemhan, belum diserahkan kepada Lemhannas RI.

Status tanah yang diserahkan sejumlah enam bidang dengan luas 20.337 M2 dan telah bersertifikat sejumlah empat bidang dengan luas 7.492 meter persegi. Tanah, bangunan, sarana, dan prasarana yang dialihkan statusnya dari Kemhan RI ke Lemhannas RI yaitu:

pertama, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 10

kedua, Jalan Kebon Sirih No. 24, 26, 28, 30 Jakarta Pusat.

Dengan ditandatanganinya berita acara serahterima oleh pihak Kemhan RI dan



Penandatanganan naskah serahterima aset oleh Marsdya TNI Eris Heryanto dan DR. Ardi Partadinata

Lemhannas RI berikut penyerahan sertifikat, makaselanjutnya Kemhan akan menghapus aset yang telah diserahkan dari daftar inventaris kekayaan negara, sedangkan pihak Lemhannas agar melaporkan aset yang telah diterima kepada Menteri Keuangan RI. Sedangkan tanah yang belum bersertifikat, Lemhannas sendiri akan segera menyelesaikan dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN).

HALAL BI HALAL DI LEMHANNAS RI

Pada tanggal 14 September 2010 segenap personel Lemhannas RI beserta para peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan XLIV dan XLV Lemhannas RI kembali melakukan kegiatan rutin sesuai fungsi dan tugas pokok masing-masing, usai cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1431 H. Hari pertama masuk kerja ini diawali dengan acara halal bi halal saling maaf memaafkan dengan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Dewan Pengarah, dan para pejabat, dan segenap personel Lemhannas RI bertempat di halaman tengah Lemhannas RI.

Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Muladi, S.H. dalam kata sambutannya mengatakan bahwa ibadah puasa yang telah kita jalani pada hakekatnya merupakan hubungan vertikal dengan Allah SWT, yang akan memancarkan pribadi-pribadi yang fitrah dan perilaku sosial yang terpuji, yang diimplementasikan dalam sikap dan tindakan melakukan perbuatan yang baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Usai berpuasa satu bulan, kita kembali untuk melakukan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk terus meningkatkan semangat kerja yang selanjutnya meningkatkan kinerja.

Selanjutnya Gubernur Lemhannas RI mengatakan bahwa Halal bi Halal yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan keakraban ini, sangat bermanfaat dalam meningkatkan komunikasi dan interaksi antar personel, antara para pejabat dengan staf bawahannya, sehingga terpelihara jalinan erat silaturahmi dan kekeluargaan di Lemhannas RI.

Pada akhir sambutannya Gubernur Lemhannas RI mengingatkan untuk selalu menjaga hubungan kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa (*hablumminallah*) dan sesama (*hablumminannas*), agar senantiasa seimbang.

Selesai memberikan sambutan singkat Halal bi Halal Idul Fitri 1431 H, dilanjutkan saling berjabat tangan secara tertib dimaksudkan sebagai ungkapan saling menyampaikan Selamat Idul Fitri 1431 H, permintaan maaf sebagai wujud kerukunan, persaudaraan dan kerjasama yang erat terjalin di lingkungan Lemhannas RI.



Suasana Halal bi Halal seluruh warga Lemhannas RI di halaman tengah Lemhannas RI

PERINGATAN NUZULUL QUR'AN 1431 H DAN ACARA BUKA PUASA BERSAMA DI LEMHANNAS RI

Pada tanggal 2 September 2010 di Gd. Dwi Warna Purwa Lemhannas RI diadakan acara buka puasa bersama yang dirangkaikan dengan acara peringatan Nuzulul Quran Tahun 1431 H. Acara yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI dan Ikatan Alumni Lemhannas RI (IKAL) tersebut mengusung tema **“Dengan Peringatan Nuzulul Qur'an di Tengah Pluralisme Bangsa guna Mengukuhkan Persatuan dan Kesatuan dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional”**.

Bulan suci Ramadhan merupakan bulan yang penuh berkah, rahmat dan pengampunan yang harus disambut dengan melakukan amal kebaikan dalam dimensi **Hablumminallah** maupun **Hablumminannas**. Acara buka puasa ini merupakan tradisi yang sangat baik dan perlu ditumbuhkembangkan karena selain dapat memperkokoh rasa kecintaan dan kebersamaan antar sesama keluarga besar Lemhannas RI juga dapat dijadikan sebagai wahana silaturahmi yang memberikan kontribusi positif, terutama dalam nilai-nilai moral spiritual guna memperkuat jati diri



Gubernur Lemhannas RI, Prof.DR. Muladi, S.H. dan Ketua Umum IKAL Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar menghadiri peringatan Nuzulul Quran Tahun 1431 H dan Buka Puasa bersama



Warga Lemhannas RI saat mendengarkan sambutan dari Ketua Umum IKAL Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar

dan peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI mengajak kepada warga Lemhannas RI agar selalu melakukan introspeksi dan merenungkan tentang berbagai hal dalam kehidupan kita, kemudian bertekad untuk melakukan perubahan-perubahan menuju keadaan yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, K.H. Tajudin Hasan dalam ceramahnya menyampaikan kutipan dari seorang pujangga Islam bahwa suatu umat akan damai, manakala umat tersebut memiliki moral, akhlak, dan budi pekerti yang mulia; dan sebaliknya suatu umat akan hancur, manakala mereka memiliki moral, akhlak, dan budi pekerti yang buruk. Penceramah juga menyampaikan bahwa manusia hidup bukan untuk mati, tapi untuk menghadapi kehidupan yang kekal dan abadi. Untuk itu harus selalu ditanamkan keyakinan bahwa akhirat itu ada. Dalam menjalani kehidupan ini kita harus selalu berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist.

Manusia diciptakan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, manusia yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah mereka yang paling bertakwa kepada-Nya.

BERITA DUKA CITA



Telah meninggal dunia karena sakit, Kolonel Pnb Drs. Bambang Suwanto, M.Si. pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 pukul 10.00 WIB di Jakarta. Almarhum lahir di Semarang, 19 Oktober 1958, adalah peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIV Lemhannas RI, meninggalkan seorang isteri dan 2 orang anak.

Pemakaman dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 September 2010 pukul 12.30 WIB di Taman Makam Bahagia Benowo Surabaya Barat.

Pimpinan dan segenap Keluarga Besar Lemhannas RI turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga semua amal ibadahnya diterima dan segala kesalahannya diampuni oleh Allah SWT. Bagi Keluarga yang ditinggalkan, diberi ketabahan dan kekuatan iman.

Pengarah : DR. Ardi Partadinata, M.H., M.Si.

Penanggung Jawab : Brigjen TNI Kusworo, **Redaktur :** Megawarni Simamora, S.E, M.M

Penyunting/Editor : Letkol Adm. Drs. M. Syahril, M.M., Mayor Inf. Risnal S.H., M.A.

Redaktur Pelaksana : Linda Purnamasari, Endah Heliana, S.Sos., Trias Noverdi, S.S.

Desain Grafis & Fotografer : Arief Musadayan, Arianto, Bambang Iman Aryanto

Sekretariat : Syafrizal, Gatot

Alamat Redaksi : Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Merdeka Selatan No. 10 Jak-Pus (10110)

Telp. (021) 3832108, 3832109, Fax. (021) 3451926,

Website <http://www.lemhannas.go.id>